

Perbandingan Pengaruh *Women's March* terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat

Comparison of the Effect of the Mowen's March on Public Policy in Indonesia and The United States

M. Solahudin Al Ayubi*, M. Syaprin Zahidi**

*Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

**Dosen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: Solah150698@gmail.com, Syaprin123@umm.ac.id

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 12 Februari 2022 Direvisi: 28 Maret 2022 Disetujui: 4 April 2022 doi: 10.22212/jp.v13i1.2910	<p>The emergence of the Women's March (WM) has had an influence on public policy in Indonesia and the United States. Since its inception at Washington in 2017, WM has reached 30 countries in the world, including Indonesia. WM's efforts in promoting women's rights and issues have had a collective influence on society's social patterns and public policies. The goal is that public policies in the US and Indonesia can provide security, protection and justice for women. Nevertheless, WM in Indonesia and the US have some differences and similarities in their influence on public policy. Through a descriptive-qualitative approach, this study will describe and critically analyze the differences and contrasts in the influence of WM on public policy in Indonesia and the US. This study uses data collection techniques based on library research using secondary sources. The theory used in comparison and contrast is MSSD (Most Similar System Design) and the theory of interest promotion groups from Hague and Harrop. This study resulted in a comparison and contrast of patterns and effects of WM in Indonesia and the US. The results are based on the strength of the influence of interest promotion groups in each country including the government's response to it.</p> <p>Keywords: Woman's March; MSSD; United States of America; Indonesia; Public Policy</p>

Abstrak

Kemunculan *Women's March* (WM) telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik di Indonesia dan Amerika Serikat. Sejak awal kemunculannya di Washington pada 2017, WM telah menjangkau 30 negara di dunia termasuk Indonesia. Upaya WM dalam mempromosikan isu-isu dan hak-hak perempuan telah memberikan pengaruh kolektif terhadap pola sosial masyarakat dan kebijakan publik. Tujuannya adalah agar kebijakan publik di AS dan Indonesia dapat memberikan keamanan, perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Meskipun demikian, WM di Indonesia dan AS memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan pengaruh terhadap kebijakan publik. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis perbedaan dan kontras pengaruh WM terhadap kebijakan publik di Indonesia dan AS. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan riset kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber kedua (secondary sources). Teori yang digunakan dalam perbandingan dan kontras adalah MSSD (Most similar System Design) serta teori kelompok kepentingan promosi dari Hague dan Harrop. Penelitian ini menghasilkan sebuah perbandingan dan kontras pola dan pengaruh WM di Indonesia dan AS. Hasil tersebut didasarkan pada dasar kekuatan pengaruh kelompok kepentingan promosi di masing-masing negara termasuk respons pemerintah dalam menanggapi.

Kata Kunci: *Woman's March*; Kelompok Kepentingan Promosi; Amerika Serikat; Indonesia; Kebijakan Publik

Pendahuluan

Women's March (WM) adalah organisasi atau kelompok yang terdiri dari aktivis untuk menyuarakan – mengampanyekan – kepentingan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan membawa isu mengenai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. WM pertama kali muncul pada 21 Januari 2017 di Washington D.C. WM dianggap sebagai kelompok – aksi protes - yang menghasilkan gelombang pasang dukungan dari sejumlah perempuan di Washington.¹ Aksi pada tahun 2017 tersebut menjadi perwakilan kelompok kepentingan yang fokus terhadap isu hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.

WM mendapatkan perhatian masif secara global setelah akun resmi Facebook “*Women's March on Washington*” dibuat.² Hal tersebut mendorong ribuan perempuan di seluruh wilayah Amerika Serikat untuk menandatangani petisi dan juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam kampanye tersebut.³ Kampanye tersebut diikuti oleh berbagai kalangan termasuk selebriti dan gelombang masa yang besar dengan tujuan yang sama yaitu menyampaikan pesan kepada Donald Trump bahwa perempuan memiliki hak-hak yang patut diterima dalam kebijakan publik karena telah tertuang dalam hak asasi manusia seperti kesetaraan gender dan ras, perlindungan terhadap imigran dan komunitas LGBT, aksesibilitas layanan kesehatan dan lain-lain.⁴

Persebaran pengaruh WM kemudian menjangkau berbagai wilayah di luar wilayah

Amerika Serikat termasuk Indonesia. Kemunculan WM di Indonesia didasari oleh rendahnya partisipasi pemerintah terhadap kebijakan publik dalam menangani isu-isu perempuan seperti hak-hak perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, tindakan asusila dan kekerasan verbal dan fisik, dan pelanggaran hak asasi perempuan di sektor publik dan privat yang masih kerap ditemukan di Indonesia.⁵ Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 299.911 kasus pada tahun 2020.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan dan diskriminasi hak terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian lebih baik dari sektor masyarakat dan pemerintah dalam memangku kebijakan publik.

Keterlibatan sebuah kelompok kepentingan dalam mempromosikan isu-isu perempuan agar dapat mempengaruhi kebijakan publik dianggap perlu untuk mengontrol dan menyeimbangkan tatanan politik suatu negara. Kehadiran WM dari tahun 2017 telah mendapatkan atensi dari banyak kalangan masyarakat di Amerika Serikat dan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan terhadap isu-isu perempuan.

Artikel ini bertujuan untuk meneliti dan membandingkan secara kritis – yaitu proses analisa teoretis melalui penalaran dan pengamatan⁷ – pengaruh *Women's March* sebagai bagian dari kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik di Indonesia dan

1 Marie Berry and Erica Chenoweth, “Who Made the Women’s March?” in *The Resistance: The Dawn of the Anti-Trump Opposition Movement*, ed. David S. Meyer and Sidney Tarrow (New York: Oxford University Press, 2018), 76-78, Oxford Scholarship Online.

2 Berry, “Who Made the Women’s March”, 81.

3 Berry, “Who Made the Women’s March”, 81.

4 Eva Mazrieva, “Protes ‘Women’s March’ di Washington Guncang Dunia”, *VoA Indonesia*, 22 Januari, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncangdunia/3686721.html>.

5 Elfina Anugrahi Saputri. “Gerakan Sosial Women’s March Jakarta Dalam Melakukan Konstruksi Atas Anti Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Indonesia” (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 2-3.

6 Catatan Tahunan 2020, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2021), 1.

7 Robert H. Ennis, *Critical Thinking: A Streamlined Conception*. In: Davies M., Barnett R. (eds) *The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education*. (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 31-47

Amerika. Jenis perbandingan MSSD (*Most similar System Design*) akan menjelaskan perbandingan pengaruh *Women's March* terhadap kebijakan publik di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbandingan tersebut berdasarkan beberapa kesamaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Amerika Serikat seperti kesamaan dalam sistem pemerintahan dengan tipe presidensial, menganut sistem multi partai (meskipun berbeda dalam takaran jumlah) serta paham demokrasi yang dianut baik secara konstitusional ataupun praktik.⁸ Tipe penelitian ini akan membandingkan sistem politik yang berbagi sejumlah karakteristik umum yang sama dalam upaya untuk menetralkan beberapa perbedaan serta melihat kemungkinan yang lain.

Kerangka Teori

Teori Perbandingan Politik

Perbandingan politik merupakan sebuah teori yang menyajikan dua atau beberapa negara dengan menggunakan teori-teori yang dapat menghasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara suatu negara dengan negara lainnya.⁹ Perbandingan tersebut biasanya mencakup politik dan pemerintahan suatu negara dengan negara lain. Perbandingan politik merupakan ilmu dan pengajaran dari berbagai jenis konstitusi, aktor politik, legislatif, dan bidang terkait, dimana semua hal tersebut berasal dari perspektif antar negara (*intrastate*). Perbandingan tersebut dilakukan dengan menekankan kajian bagaimana institusi-institusi pemerintah menjalankan fungsinya dalam suatu negara.¹⁰

Perbandingan politik ini dapat dilakukan dengan cara memahami sebuah perilaku

negara dengan mencari penjelasan mengenai latar belakang perilaku tersebut dengan menggunakan teknik atau metodologi perbandingan.¹¹ Perbandingan politik juga membandingkan kegiatan-kegiatan politik yang mencakup mengenai pemerintahan di berbagai lembaganya serta organisasi-organisasi yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan antara lain suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, organisasi dan berbagai perserikatan termasuk kelompok kepentingan.¹²

Tujuan perbandingan politik salah satunya mencoba untuk memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem di suatu negara. Tujuan lain dari perbandingan politik ini untuk memahami bagaimana bekerjanya berbagai sistem politik di suatu negara, mengetahui ciri-ciri sistem politik yang sama antar dua negara yang dibandingkan serta mengetahui alasan kestabilan antar negara berbeda-beda.

Melalui manfaat perbandingan politik, kita dapat mempelajari hal-hal mengenai alokasi dan pergantian kekuasaan dengan pembuatan suatu keputusan, peran dan sistem pemerintahan, serta pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik.¹³ Kita juga dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu pimpinan pemerintahan di suatu negara dan kebijakan khusus yang dilakukan seperti stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, perdamaian dan kesehatan masyarakat di negaranya. WM sebagai salah satu bagian dari kelompok kepentingan promosi - *promotional group* - akan dijadikan objek perbandingan dalam mempengaruhi dinamika kebijakan publik

8 Kadir Herman, "Perbandingan Pemilu Di Indonesia Dengan Di Amerika", *Bantuan Hukum* 13 Juli 2021. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-perbandingan-pemilu-di-indonesia-dengan-di-amerika>

9 Rod Hague & Martin Harrop, *Comparative Government and Politics*. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 60-80.

10 Hague, *Comparative Government*, 60-80.

11 Budi Setiyono, *Konsepsi dan Perbandingan Politik*. (Semarang: Eprints UNDIP, 2019), 43-45, http://eprints.undip.ac.id/76167/1/BUKU_KONSEPSI_DASAR_ILMU_POLITIK_editted_30_agustus.pdf

12 Rod Hague & Martin Harrop, Loc.cit.

13 Rod Hague & Martin Harrop, Loc.cit.

di Indonesia dan Amerika khususnya pada sektor isu dan hak-hak perempuan.

Øyen dalam bukunya menjelaskan bahwa *'no social phenomenon can be isolated and studied without comparing it to other social phenomena'* – Tidak ada fenomena sosial yang dapat diisolasi dan dipelajari tanpa membandingkannya dengan fenomena-fenomena sosial lainnya.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa membandingkan peran WM terhadap kebijakan publik di Indonesia dan Amerika Serikat sebagai salah satu fenomena sosial dapat meningkatkan khazanah di bidang penelitian sosial dan politik. Selain itu, perbandingan WM sebagai salah satu fenomena sosial juga dapat memperkaya hasil dari bagaimana suatu kelompok kepentingan berhasil atau gagal dalam mempengaruhi kebijakan publik di suatu negara.

Pada penelitian ini, perbandingan akan menggunakan metode MSSD (*Most Similar System Design*) yaitu perbandingan negara-negara (Indonesia-Amerika Serikat) dengan menggunakan beberapa kesamaan umum (sistem pemerintahan, paham demokrasi, multi partai) dalam menunjukkan sebuah hasil yang ingin dijelaskan.¹⁵ MSSD memiliki fokus untuk mencapai perbandingan dari beberapa negara termasuk faktor didalamnya - kelompok kepentingan, partai politik, ideologi dll. Kerangka kerja MSSD berusaha untuk menganalisis kesamaan umum WM terhadap dinamika kebijakan publik Indonesia dan Amerika Serikat dalam sektor isu-isu perempuan.

Kelompok Kepentingan Promosi

Kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi atau kelompok penekan yang memiliki otonomi tertentu dari pemerintah

atau partai politik dan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.¹⁶ Kelompok kepentingan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan negara. Jika partai politik bercita-cita menjadi pemerintah, maka kelompok kepentingan hanya berusaha mempengaruhinya. Artinya, kelompok kepentingan tidak melawan pemilihan; sebaliknya, mereka biasanya mengadopsi pendekatan pragmatis. Melalui pendekatan tersebut, kelompok kepentingan dianggap dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu pemerintahan.

Kelompok kepentingan biasanya melakukan pekerjaan mereka dengan tenang. Meskipun demikian banyak kelompok kepentingan yang juga melakukan aktivitas mereka dengan menyebar pengaruh dengan jangkauan lebih luas khususnya di negara demokrasi.¹⁷ Dalam beberapa kasus, kelompok kepentingan melakukan upaya negosiasi dengan birokrat pemerintah, mendesak kasus atau isu yang dibawa, dan berusaha mempengaruhi liputan media tentang posisi mereka. Kelompok kepentingan biasanya terdiri dari badan yang menggunakan berbagai bentuk advokasi untuk mempengaruhi opini dan/ atau kebijakan publik. Kelompok kepentingan juga dapat terbagi menjadi beberapa kelompok seperti masyarakat terpelajar, kelompok minat khusus, sekelompok individu yang berbagi pengetahuan khusus. masyarakat universitas atau sekelompok yang memiliki tujuan yang sama.¹⁸

Terdapat beberapa gelombang dari kelompok kepentingan di Amerika Serikat salah satunya pada tahun 1960 – 80 terdapat banyak kelompok kepentingan dalam bidang lingkungan dan publik. Salah satu contoh dari kelompok ini adalah organisasi nasional untuk perempuan.¹⁹ Meskipun demikian, kelompok kepentingan terbagi menjadi dua bagian besar

14 Øyen Else, *Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research*, (London: Sage, 1990), 4.

15 Kenneth Newton & Jan W. Van Deth, *Foundation of Comparative Politics* (New York: Cambridge University Press, 2010), 407.

16 Rod Hague & Martin Harrop, *Op.cit*, 166.

17 Hague, *Comparative Government*, 167.

18 Hague, *Comparative Government*, 167.

19 Hague, *Comparative Government*, 167.

yaitu kelompok kepentingan protektif dan kelompok kepentingan promosi.²⁰

Kelompok kepentingan protektif mencari keuntungan selektif untuk anggota mereka dan status orang dalam dengan departemen pemerintah terkait. Kelompok kepentingan protektif juga dapat didasarkan pada kepentingan lokal, bukan kepentingan fungsional. Dengan demikian, pada tipe kelompok kepentingan ini terkenal dengan istilah kelompok geografis yang tersusun. Kelompok kepentingan protektif bukan satu-satunya jenis kepentingan terorganisir. Memang, banyak kelompok yang didirikan sejak 1960-an lebih bersifat promosi daripada protektif. Kelompok promosi menganjurkan ide, identitas, kebijakan, dan nilai. Disebut juga kelompok sikap, tujuan dan kampanye, kelompok promosi termasuk kelompok pro dan anti aborsi, organisasi yang memerangi pornografi dan kelompok ekologi. Biasanya kelompok kepentingan promosi memberikan pengaruh kepada pemerintah dengan jalan demokrasi dan pengaruh yang lebih masif karena keanggotaan yang selalu meningkat.

kelompok kepentingan. Mereka termasuk kepada kelompok kepentingan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintah khususnya mengenai kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan isu perempuan. WM termasuk pada tipe kelompok kepentingan promosi karena memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Rod Hague & Martin Harrop.

Beberapa alasan WM memenuhi kriteria sebagai kelompok kepentingan promosi. *Pertama, a group for – promotes a cause*, sebuah kelompok yang mempromosikan suatu tujuan.²¹ WM memiliki tujuan untuk mempromosikan isu hak asasi manusia khususnya mengenai kesetaraan gender dan perempuan. *Kedua, open – everybody can join*, semua orang dapat bergabung.²² Dalam sektor keanggotaan, WM terbuka untuk umum dan tidak terbatas. Artinya siapa saja bisa ikut keanggotaan, mengikuti kampanye dan turut berpartisipasi dalam suatu petisi. Keanggotaan dan pengaruhnya yang masif dapat menjangkau bagian dari wilayah lain, seperti jangkauan terhadap keanggotaan di Indonesia. *Ketiga,*

BOX 10.2 Protective and promotional groups		
	Protective groups	Promotional groups
Aims	A group of – defends an interest	A group for – promotes a cause
Membership	Closed – membership is restricted	Open – anybody can join
Status	Insider – frequently consulted by government and actively seeks this role	Outsider – not consulted as often by government. Emphasizes public opinion and the media
Benefits	Selective – only group members benefit	Collective – benefits go to both members and non-members
Focus	Mainly national – group aims to influence national government	More international – group may seek to influence bodies such as the EU and global public opinion

Sumber Bagan: Rod Hague & Martin Harrop in *Comparative Government and Politics*

Berikut ini beberapa perbedaan antara kelompok kepentingan protektif dan promosi.

WM dianggap sebagai bagian dari

outsider – not consulted often by government but used to emphasize public opinion and media, orang luar – tidak sering dikonsultasikan

20 Hague, *Comparative Government*, 168.

21 Hague, *Comparative Government*, 168.

22 Hague, *Comparative Government*, 168.

oleh pemerintah tetapi digunakan untuk menekankan opini publik dan media.²³ Kriteria ini sesuai dengan status WM yang lebih mengedepankan opini publik dan media dibandingkan keterlibatan langsung dengan pemerintah. WM aktif dalam menggiring masyarakat dan menekan pemerintah untuk mendengarkan suara dan tuntutan terhadap kebijakan yang melibatkan isu-isu perempuan. Selain itu, WM mengedepankan opini publik dengan memanfaatkan media publik (media sosial) sebagai wadah mereka seperti Facebook di Amerika (pada awal kemunculan dan penyebaran WM), Instagram dan beberapa media sosial lainnya sebagai alat dalam menyebarkan pengaruhnya terhadap kebijakan publik. *Keempat, collective – benefits goes to both members and non-members* – manfaat dari kelompok kepentingan yang bersifat kolektif.²⁴ WM memiliki tujuan dan isu yang diperjuangkan dan dapat bermanfaat bagi anggota ataupun publik pada umumnya. Isu kesetaraan gender – hak-hak perempuan – merupakan isu yang selalu diperjuangkan oleh masyarakat dunia, sehingga manfaat dari WM dapat berguna untuk bersama (bukan hanya anggota WM). *Terakhir, more international* – jangkauan yang lebih internasional.²⁵ Fokus yang dibawa bukan hanya tertuju pada jangkauan nasional saja namun juga internasional. Ini dibuktikan dengan bagaimana pengaruh WM yang diterima di berbagai wilayah belahan dunia termasuk salah satunya diperjuangkan di Indonesia, meskipun awal kelompok ini muncul adalah di Amerika.

Perbandingan pengaruh kelompok kepentingan dari dua negara yang berbeda dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil perbandingan politik dan sistem pemerintahan. Melalui konsep kepentingan kelompok, WM dianggap mampu untuk mempengaruhi

kebijakan publik pemerintah suatu negara. Terlebih lagi dengan melakukan suatu perbandingan antara WM di Amerika Serikat dengan WM di Indonesia, sebuah penelitian akan menghasilkan sebuah perbandingan hasil pengaruh berbeda terhadap suatu kebijakan publik meskipun dari kelompok kepentingan yang sama.

Sejarah Women's March di Amerika Serikat

Women's march di Amerika Serikat pertama kali muncul pada 21 Januari 2017 tepatnya di Kota Washington DC, dengan misi untuk memobilisasi serta mengumpulkan aksi guna membela hak asasi perempuan secara global.²⁶ Gelombang aksi protes ini diawali oleh inisiatif dari seorang perempuan asal Hawaii di akun Facebook miliknya bernama Teresa Shook untuk mengundang 40 orang temannya guna melakukan aksi protes atas kemenangan Donald Trump, yang kemudian undangan tersebut menghangat ke pengguna Facebook lainnya sehingga menyebabkan munculnya akun-akun lain yang bersedia untuk ikut serta dalam aksi protes tersebut. Setelah itu, mereka mulai menyatukan kekuatan dengan membuat laman Facebook resmi yaitu "*Women's March on Washington*" yang kemudian membuat ribuan perempuan lainnya di seluruh wilayah Amerika Serikat menandatangani petisi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.²⁷

Aksi protes tersebut dilakukan setelah beberapa jam Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45. Aksi protes saat itu diwarnai oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa hingga selebriti. Mereka datang dalam gelombang massa yang memiliki satu tujuan yaitu sebuah pesan terhadap

23 Hague, *Comparative Government*, 168.

24 Hague, *Comparative Government*, 168.

25 Hague, *Comparative Government*, 168.

26 M. Zulfadhilah. "Pengaruh Gerakan Transnasional Women ' S March Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018" (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

27 Zulfadhilah. "Pengaruh Gerakan", 2.

Donald Trump bahwa perempuan juga memiliki hak-hak yang patut mereka terima karena telah tertuang dalam hak asasi manusia. Isu yang ditekankan pada aksi tersebut adalah mengenai hak-hak perempuan termasuk isu kesetaraan gender dan ras, aksesibilitas layanan kesehatan dan perlindungan terhadap imigran, dan lain-lain.²⁸

Awalnya, WM merupakan sebuah aksi yang memprotes terhadap pemerintahan Trump dan ancaman yang diwakilinya terhadap reproduksi, sipil dan hak asasi manusia. Ratusan ribu orang berkumpul di ibu kota AS, Washington sebagai bentuk protes atas kampanye yang disampaikan Trump dan menyinggung banyak kalangan salah satunya tentang hak perempuan. Diperkirakan terdapat 3,6 – 4,6 juta orang yang hadir dalam protes tersebut di AS dengan total mencapai 5 juta orang di seluruh dunia.²⁹ Sekitar 500.000 orang di Washington (menurut The Associated Press, direktur keamanan dalam negeri Distrik Columbia, Christopher Geldart), 400.000 orang di New York (menurut kantor Walikota Bill de Blasio), 175.000 di Boston (menurut Nicole Caravella), 250.000 di Chicago (menurut Chicago Tribune), 175.000-250.000 di Seattle, dan 500.000-750.000 di Los Angeles.³⁰ Kemudian, polisi St. Paul mengeluarkan jumlah massa resmi dari 50.000 hingga 60.000 orang.³¹ Lalu menurut juru bicara Walikota Martin J. Walsh. Departemen Kepolisian Atlanta memperkirakan sekitar 60.000 orang menghadiri rapat umum di sana. Departemen Keamanan Publik di Phoenix memperkirakan bahwa sekitar 20.000 orang hadir, sementara di Key West, Florida, sebuah kota berpenduduk 25.000, polisi mengatakan lebih dari 2.000 orang berbaris.³² WM berhasil

menjadi aksi protes terbesar dalam sejarah AS.³³

Aksi yang berawal dari protes ketidakpuasan atas terpilihnya Trump sebagai Presiden serta pernyataan kontroversinya mengenai hak perempuan mendorong WM bukan hanya sebagai bagian dari aksi protes semata namun juga kelompok kepentingan dari pihak oposisi khususnya dari Partai Demokrat AS. Melalui isu yang dibawa tentang hak asasi manusia dan perempuan, WM berhasil memberikan pengaruh besar terhadap retorika dan dinamika politik di AS termasuk pengaruhnya dalam menjangkau bagian dari negara-negara di dunia. Keberadaan WM hingga saat ini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik di Amerika Serikat. WM juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Pada tahun 2021, WM diikuti oleh berbagai kalangan baik perempuan dan laki-laki termasuk dukungan dari ribuan kelompok termasuk *Planned Parenthood Federation of America*, Serikat Pekerja Layanan Internasional dan Jaringan Perawatan Aborsi.³⁴

5 tahun eksistensi WM di Amerika Serikat dan telah memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan publik, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Dalam situs web resminya, WM Amerika menyatakan '*for 5 years we have fought for the changes we believe in. Now, we reimagine a feminist future for ourselves. Together, we can create this future*' – selama 5 tahun kami berjuang untuk perubahan yang kami yakini. Sekarang, kami membayangkan kembali masa depan feminis untuk diri kami sendiri. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan ini.³⁵

28 Zulfadhilah. "Pengaruh Gerakan", 2.

29 "Woman's March", *History.com*, 05 January 2018, diakses pada 01 Januari 2022 <https://www.history.com/this-day-in-history/womens-march>

30 "Woman's March" *History.com*.

31 "Woman's March" *History.com*.

32 John P. Rafferty, "Women's March, worldwide protest [2017]" *Britannica* 21 Januari 2017, diakses pada 16 Maret 2022 <https://www.britannica.com/event/>

[Womens-March-2017](#)

33 Rafferty, "Women's March"

34 Tori B. Powell, "Thousands gather for the 2021 Women's March to stand up for abortion rights" *CBS News*, 4 October, 2021, diakses pada 01 Januari 2022 <https://www.cbsnews.com/live-updates/womens-march-watch-live-stream-today-2021-10-02/> ,

35 "5 years Women's March," *Women's March*, di akses pada 01 Januari 2022, <https://www.womensmarch.org/>

Sejarah Women's March di Indonesia

Setiap tanggal 8 Maret, negara-negara di Dunia memperingati *International Women's Day* (IWD). Yang diawali sejak tahun 1911 yang bertujuan untuk memobilisasi dan mengumpulkan aksi-aksi untuk membela Hak Asasi Perempuan secara global. Hak Asasi Perempuan sendiri merupakan hak yang penting untuk diperoleh oleh kaum perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai perempuan itu sendiri.³⁶ Aksi protes yang berawal dari AS ini kemudian menjangkau banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, gerakan sosial WM pertama kali diadakan oleh *Jakarta Feminist Discussion Group* pada 4 Maret 2017 tepatnya di Jakarta.³⁷ Hal tersebut merupakan aksi protes yang terjadi di Taman Pandang Istana, diikuti oleh kurang lebih 700 partisipan yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi dan komunitas masyarakat.³⁸

WM di Indonesia memiliki tujuan sebagai aksi - kampanye - untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang terjadi pada November 2017, WM melakukan beragam kegiatan kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menghapus kekerasan yang makin meluas dan sering terjadi di Indonesia. Sehingga itu merupakan salah satu alasan WM dilakukan di Indonesia.³⁹ Tujuan lain dilakukan WM di Indonesia adalah untuk mendorong adanya perubahan sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi agar hak-hak perempuan dapat diakui, dipenuhi, dan dilindungi. Serta menuntut agar pemerintah dan masyarakat melindungi lingkungan hidup dan pekerja perempuan.

Pada tahun 2017, WM di Indonesia mengeluarkan 8 tuntutan seperti tuntutan agar Indonesia kembali ke toleransi dan keragaman, tuntutan agar pemerintah mengadakan infrastruktur hukum yang berkeadilan gender, tuntutan agar pemerintah dan masyarakat dapat memenuhi hak kesehatan perempuan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, tuntutan agar pemerintah dan masyarakat dapat melindungi lingkungan kerja dan hidup perempuan, tuntutan agar pemerintah dapat membuat kebijakan publik yang pro kelompok marginal dan perempuan, tuntutan agar pemerintah dan parpol dapat meningkatkan keterlibatan dan proposisi keterwakilan perempuan di bidang politik, tuntutan agar pemerintah dan masyarakat dapat menghormati dan menghapus segala bentuk diskriminasi, dan terakhir yaitu tuntutan agar pemerintah dan masyarakat dapat ikut serta memperhatikan isu-isu global termasuk isu solidaritas perempuan dunia.⁴⁰

Perkembangan pengaruh dari aksi protes WM di Indonesia kemudian berperan sebagai kelompok kepentingan yang menumpang suara-suara publik untuk mendesak pemerintah agar segera menyetujui RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang kemudian diikuti oleh 8 tuntutan lainnya pada aksi di tahun 2018.⁴¹ Tuntutan-tuntutan tersebut di antaranya: 1) menuntut pemerintah untuk menghapus hukum dan kebijakan diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender; 2) menuntut pemerintah untuk membuat hukum dan kebijakan yang mendukung yang berbasis kekerasan dan

40 Tempo.co, "Women's March Jakarta Mengusung 8 Tuntutan untuk Pemerintah" *Nasional Tempo* 4 Maret 2017, diakses pada 16 Maret 2022 <https://nasional.tempo.co/read/852617/womens-march-jakarta-mengusung-8-tuntutan-untuk-pemerintah/full&view=ok>

41 Puput Tripeni Juniman, "Woman's March di Jakarta Suarakan 8 Tuntutan", *CNN Indonesia* 03 Mei, 2018, diakses pada 4 Januari 2022 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180303100532-277-280137/womens-march-di-jakarta-suarakan-8-tuntutan>

[com/](https://www.com/)

36 Elfina Anugrahi Saputri. Loc.cit.

37 Saputri, Loc.cit

38 Saputri, Loc.cit

39 Dina Martiany, "International Women'S Day Dan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Seksual", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no.5, (Maret 2018): 13-18

gender; 3) menuntut pemerintah dalam akses keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan; 4) menghapus stigma dan diskriminasi terutama kelompok dalam status kesehatan seperti HIV dan narkoba; 5) menuntut pemerintah untuk menyelesaikan akar dari kekerasan berbasis gender yaitu yang memiskinkan perempuan; 6) menghentikan intervensi negara terhadap tubuh dan seksualitas warga negara; 7) menghapus praktik dan budaya kekerasan gender dan; 8) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menghapus kekerasan berbasis gender.⁴²

Aksi WM di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2019, WM di Indonesia mengangkat tema perempuan dan politik.⁴³ Pada WM tahun 2019 terdapat 10 tuntutan di antaranya: 1) mendesak pengesahan seluruh UU untuk penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor; 2) menghapus atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang diskriminatif; 3) memastikan pelaksanaan undang-undang desa dan undang-undang nelayan untuk mengakomodasi kebutuhan dan keterlibatan perempuan secara inklusif dan berwawasan lingkungan; 4) memastikan pelaksanaan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia berpihak pada perempuan pekerja migran dan memberantas tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi; 5) menghentikan dan mengusut semua tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi terhadap perempuan, kelompok marginal dan minoritas lainnya; 6) menjalankan sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender; 7) menuntut pembangunan yang mengutamakan keadilan gender secara komprehensif dan

inklusif, termasuk memperbaiki infrastruktur dan layanan transportasi; 8) meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan menuntut partai politik untuk melakukan fungsi pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berperspektif gender; 9) kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif; 10) memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender dan inklusif.⁴⁴

Pada tahun 2020, WM di Indonesia mengusung tema “Bergerak mendobrak patriarki” dengan membawa 6 tuntutan. *Satu*, tuntutan untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan. *Dua*, tuntutan untuk membangun sistem perlindungan komprehensif untuk perempuan. *Tiga*, tuntutan untuk mencabut kebijakan diskriminatif gender. *Empat*, tuntutan untuk segera menyahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. *Lima*, tuntutan untuk menolak Omnibus Law, RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga. *Enam*, tuntutan untuk menghentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor.⁴⁵

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 WM dilakukan secara virtual. Pada tahun 2021, WM mengangkat tema “Puan dan kawan melawan”.⁴⁶ Tema ini membahas isu kerentanan terhadap perempuan sekaligus ide-ide inovatif dari perempuan Indonesia. Meskipun diadakan secara virtual namun

42 Juniman, “Woman’s March di Jakarta”

43 Muhammad Syahrul Ramadhan, “Women’s March 2019 Usung Tema Perempuan dan Politik”, *Medcom*, 25 April, 2019, diakses pada 05 Januari 2022 <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNg5017k-women-s-march-2019-usung-tema-perempuan-dan-politik>

44 YTB, “Women’s March 2019 Suarakan 10 Tuntutan”, *Berita Satu*, 27 April, 2019, diakses pada 05 Januari 2022 <https://www.beritasatu.com/video-berita/551162/womens-march-2019-suarakan-10-tuntutan>

45 Bangun Santoso dan Stephanus Aranditio “6 Tuntutan Kaum Perempuan di Peringatan Women International Day 2020” *Suara.Com* 08 Maret 2020, diakses pada 05 Januari 2022 <https://www.suara.com/news/2020/03/08/131114/6-tuntutan-kaum-perempuan-di-peringatan-woman-international-day-2020>

46 Tabayyun Pasinringi, “Women’s March Jakarta Tetap Berlangsung di Tengah Pandemi” *Magdalene*, 20 April 2021, diakses pada 05 Januari 2022 <https://magdalene.co/story/womens-march-jakarta-tetap-berlangsung-di-tengah-pandemi>

antusiasme masyarakat dalam mengikuti WM 2021 tetap membara. WM 2021, mengundang berbagai pembicara untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Di tengah pandemi, WM membawa beberapa tuntutan seperti desakan untuk menyalakan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan berbasis gender; pencabutan terhadap kebijakan yang merusak lingkungan serta dorongan untuk mengelola lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif serta perlindungan untuk masyarakat adat; desakan untuk pemerataan akses pendidikan dan melindungi pelajar (dari kekerasan seksual, perundungan, dan penyalahgunaan hak-hak pelajar); desakan untuk menyalakan undang-undang yang berpihak pada masyarakat, perempuan, kelompok minoritas, dan rentan lainnya; dorongan terhadap inklusifitas sistem kesehatan yang bebas stigma dan diskriminasi; desakan untuk memperhatikan bidang ketenagakerjaan dan perburuhan; dukungan untuk demokratisasi terhadap solidaritas global, penolakan terhadap otoritarianisme, tindak kekerasan, rasisme, dan diskriminasi lainnya di berbagai sektor.⁴⁷

WM mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, selebriti, liputan media, dan badan pemerintah seperti Komnas Perempuan. Perjuangan WM sebagai kelompok kepentingan promosi - yang bertujuan untuk mempromosikan isu-isu perempuan di Indonesia telah mendapatkan atensi besar. Saat ini akun resmi Instagram WM Jakarta memiliki jumlah 15.9000-an pengikut, sedangkan WM pusat memiliki jumlah 1,4 juta pengikut di seluruh dunia.

Pengaruh WM Terhadap Pemilihan Umum, Kebijakan Pelecehan Seksual dan Hak - Hak Reproduksi di AS

Salah satu tujuan WM di AS adalah memberdayakan perempuan melalui tuntutan atas persamaan hak dengan laki-laki. WM

memiliki pengaruh dalam mengampanyekan serta mengajarkan pada semua perempuan mengenai cara mereka bertindak dalam menentang praktik kekerasan dan memberikan sebuah pemahaman terhadap banyaknya individu agar tidak lagi memandang para perempuan sebagai sebuah objek.⁴⁸ Artinya, pengaruh WM di AS telah meningkatkan kesadaran kognitif masyarakat akan pentingnya atensi terhadap isu-isu perempuan khususnya diskriminasi dan marginalisasi hak-hak perempuan.

Pengaruh yang dibawa oleh WM di AS kemudian mendapatkan perhatian dari 30 negara lainnya yang kemudian menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan seperti Pakistan, Australia, Kanada, Taiwan, Argentina hingga Indonesia.⁴⁹ WM juga mendapatkan perhatian dari berbagai politisi, akademisi dan masyarakat. Beberapa politisi menjadikan WM sebagai salah satu bagian dari kelompok kepentingan adalah tim oposisi Trump yaitu dari Partai Demokrat AS.

WM juga dibentuk sebagai salah satu upaya dalam memperingati hari perempuan Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 8 Maret. Mereka juga menyuarakan sebuah aksi 'sehari tanpa perempuan' yang memiliki tujuan untuk menyoroti pengaruh perempuan dalam sistem sosial, politik dan ekonomi AS. Mereka juga menyuarakan tentang bagaimana pekerjaan yang dibayar maupun tak dibayar oleh perempuan membuat rumah tangga, masyarakat dan ekonomi berjalan.⁵⁰ Tujuan mereka bergerak, dan menyuarakan suara terhadap kebijakan publik yang masih rentan terhadap diskriminasi hak-hak perempuan adalah untuk membuktikan potensi-potensi

48 Rumiri Aruan, "Emansipasi Wanita Amerika dari Masa ke Masa", *Lentera Ejournal Unri* 2, no. 4, 2011: 24-36

49 "Perjalanan Woman's March dari Amerika hingga Indonesia Visual Stories" *Liputan 6*, diakses pada 05 Januari 2022, <https://m.liputan6.com/pages/perjalanan-women-march-dari-amerika-hingga-indonesia>

50 Rumi Aruan, Loc.Cit

47 Pasinringi, "Women's March Jakarta"

yang dimiliki oleh kaum perempuan juga sama besarnya dengan para kaum lelaki. Beberapa tuntutan yang sering disuarakan oleh WM AS adalah desakan terhadap proposisi pemimpin di bangku pemilihan umum, kerentanan pelecehan seksual di ranah pendidikan dan pekerjaan, serta hak-hak reproduksi.⁵¹

Di bidang pekerjaan, perempuan masih memperoleh pengucilan jenis kerja dan kerja upahan. Telah tercatat bahwa buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik yang bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) telah mencapai 70 persen.⁵² Maka dari hal tersebut, mereka begitu rentan dalam memperoleh kekerasan termasuk pelecehan seksual. Selain itu, proposisi pemerintahan yang didominasi laki-laki juga meninggalkan kesan patriarki. Maka itu, dominasi laki-laki terhadap perempuan di Amerika Serikat masih menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi kaum perempuan dan menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh WM dalam mempengaruhi kebijakan publik AS.⁵³

Pengaruh WM terhadap pemilu AS dimulai saat kemenangan Demokrat Michigan yang diwakili oleh Gretchen Whitmer. Whitmer berhasil memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Michigan yang telah dipegang oleh Partai Republik selama 40 tahun terakhir.⁵⁴ Whitmer adalah bagian

dari evolusi WM, dan diharapkan akan memiliki pengaruh besar pada kebijakan publik dan pemilihan umum tahun 2020. WM telah berhasil meningkatkan proposisi representasi pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat sejak kemunculannya tahun 2017. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan 84% yaitu sekitar 116 dari 535 anggota terpilih sebagai anggota parlemen bukan dari golongan kulit putih dan 102 perempuan terpilih menjadi anggota dewan di DPR pada tahun 2018.⁵⁵ Orang Afrika dan penduduk asli Amerika mengambil bagian di DPR dari total populasi (masing-masing 12% dan 1%).⁵⁶ Momentum penting bagi WM dalam pemilu adalah kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris pada tahun 2020. WM melihat bahwa kampanye yang dibawa oleh Biden selaras dengan tujuan mereka yaitu penghapusan diskriminasi gender dan rasisme seperti isu kemanusiaan, pemberantasan rasisme, atensi terhadap hak-hak anak dan kaum kulit hitam.⁵⁷ Joe Biden juga sering mengatakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan pada masa Trump.⁵⁸ Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kebijakan publik pada masa kepresidenan Biden khususnya kebijakan pada sektor gender dan hak-hak perempuan.

WM juga berhasil mendesak pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi pelecehan seksual di ranah pendidikan dan pekerjaan. Judul VII Undang - Undang Hak Sipil 1964 dan Judul IX Amandemen Pendidikan berlaku bekerja sama untuk melindungi karyawan dan siswa, masing-masing, dari diskriminasi telah

51 Jenée Desmond-Harris, "The Women's March is more than an anti-Trump protest. Here's what participants want." *Vox* 21 Januari 2017, diakses pada 19 Maret 2022 <https://www.vox.com/2017/1/21/14342942/womens-march-inauguration-trump-protest-goals-feminism-demands>

52 Anemona Hartocollis & Yamiche Alcindor. "Women's March Highlights as Huge Crowds Protest Trump: We're Not Going Away" *New York Times*, 21 January 2017, diakses pada 5 Januari 2022 <https://www.nytimes.com/2017/01/21/us/womens-march.html?auth=link-dismiss-google1tap>

53 Ana Christi Suwardi, "Belajar dari Gerakan Women's March Washington" *Geo Times* 5 Maret 2017, diakses pada 5 Januari 2022 <https://geotimes.id/kolom/sosial/belajar-dari-gerakan-womens-march-washington/>

54 Anna North, "The Women's Marches are shrinking. Their influence isn't." *Vox* 17 Januari 2020, diakses pada 19 Maret 2022 <https://www.vox.com/2020/1/17/21068870/2020-womens-march->

[washington-election-women-voting](https://www.washington-election-women-voting)

55 Magdalena Larrebourg & Felipe Gonzalez, "The Impact of the Women's March on the U.S. house Election" (Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2021) 4-5 diakses pada 19 Maret 2022 <https://economia.uc.cl/wp-content/uploads/2021/03/dt-560.pdf>

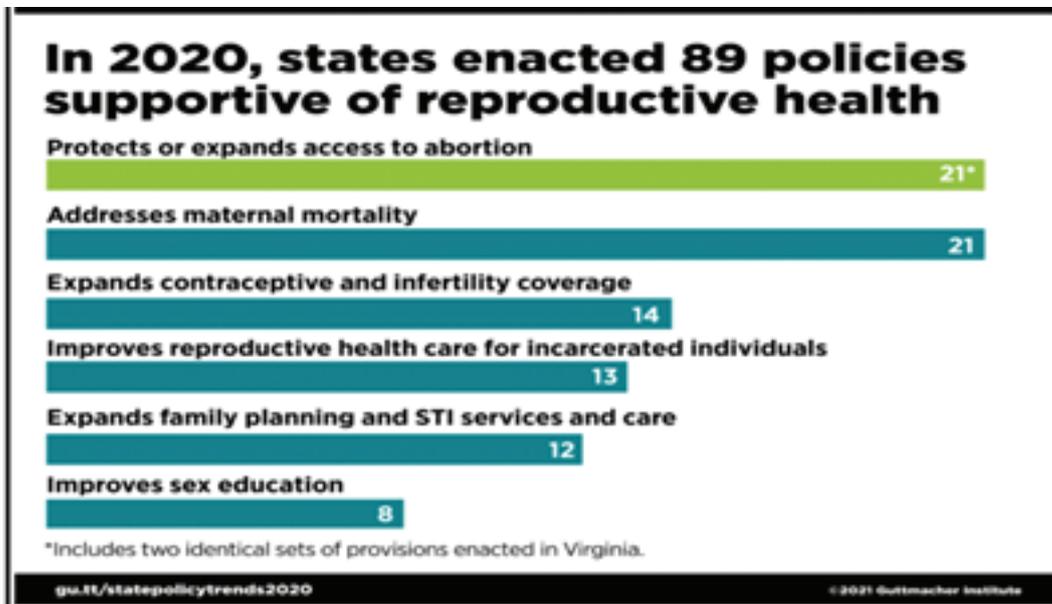
56 Larrebourg, "The Impact of the Women's March"

57 Samuel Carliston Anggima Silalahi, "Analisis Strategi Kemenangan Joe Biden Pada Pemilu Di Amerika Serikat Tahun 2020" (Universitas Sumatera Utara, 2021), 7-8

58 Silalahi, "Analisis Strategi Kemenangan"

menjadi konstitusi yang mengatur hak-hak sipil termasuk pelecehan seksual dan diskriminasi.⁵⁹ WM berhasil mendorong pemerintah dengan mendesak Kantor Hak Sipil AS untuk mengeluarkan penjelasan dan kebijakan pelecehan seksual. Pada tanggal 29 Januari 2019, Kantor Hak Sipil AS mengeluarkan kebijakan yang menjelaskan definisi pelecehan seksual secara komprehensif, tanggung jawab Kantor Hak Sipil apabila terjadi pelecehan seksual di ranah pendidikan dan pekerjaan, serta hak dan tanggung jawab pekerja dan sipil di bawah kebijakan. Kantor Hak Sipil AS juga memastikan agar setiap warga negara AS

reproduksi di tengah pandemi. Terdapat 89 kebijakan yang berlakukuan dalam beberapa ruang lingkup seperti 21 kebijakan mengenai proteksi dan perluasan terhadap aborsi, 21 kebijakan mengenai pencegahan kematian ibu, 14 kebijakan mengenai perluasan cakupan kontrasepsi dan infertilitas, 13 kebijakan mengenai peningkatan perawatan Kesehatan reproduksi bagi individu yang dipenjara, 12 kebijakan tentang perluasan rencana keluarga dan pelayanan dan perawatan STI (Penyakit sex menular), dan 8 kebijakan tentang peningkatan tentang pendidikan sex.⁶¹



Sumber: Guttmacher Institute "State Policy Trends 2020"

untuk menjadikan kontak hak sipil sebagai kontak utama apabila mengalami pelecehan seksual.⁶⁰

WM juga berhasil dalam mempengaruhi kebijakan tentang hak-hak reproduksi. Pada tahun 2020, AS memberlakukan kesehatan

Pengaruh WM terhadap UU Perlindungan Pekerja Migran, PERMA No. 3 Tahun 2017 dan RUU PKS di Indonesia

WM di Indonesia merupakan wadah untuk memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan, seperti menolak keras tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, dan

59 Benya FF, Widnall SE, Johnson PA, editors, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. (Washington: National Academies Press, 2018), Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment. diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519453/>

60 United State Government, "Sexual Harassment Policy, Office of Civil Rights" U.S. Department of State 29 Januari 2019, diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.state.gov/key-topics-office-of-civil-rights/sexual-harassment-policy/>

61 Elizabeth Nash, Lizamarie Mohammed, Olivia Cappello, and Sophia Naide, "State Policy Trends 2020: Reproductive Health and Rights in a Year Like No Other" Guttmacher Institute 15 December 2020, diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.guttmacher.org/article/2020/12/state-policy-trends-2020-reproductive-health-and-rights-year-no-other>

isu-isu ketimpangan pemenuhan hak terhadap perempuan di Indonesia termasuk perlindungan pekerjaan dan HAM. Di Indonesia, WM pertama kali muncul pada 4 Maret 2017 oleh Kelompok Diskusi Feminis Jakarta.⁶² WM memanfaatkan perkembangan media sosial dan internet untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai bagian dari kelompok kepentingan promosi, pemanfaatan media sosial – liputan media dan opini publik, WM percaya dapat mempengaruhi retorika kebijakan publik di Indonesia. Media sosial telah menjadi *campaign-tool* modern yang dapat menjangkau atensi publik. Sejarah juga telah mencatat berbagai keberhasilan liputan media terhadap perkembangan dalam memerangi tindakan marginalisasi dan diskriminasi serta kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini terbukti pada saat semakin banyak perempuan yang mencoba untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan kekerasan dengan menggunakan media sosial untuk menciptakan dukungan, kekuatan, dan menawarkan tempat bagi individu yang pernah mengalami kekerasan seksual untuk mengekspresikan semua pengalaman buruk mereka.⁶³

WM memanfaatkan media sosial dengan meluncurkan akun resmi Instagram yang hingga saat ini memiliki 15 ribu lebih pengikut. Melalui laman Instagram tersebut, WM telah menerbitkan sekitar 274 unggahan yang memberikan informasi permasalahan perempuan dalam bentuk gambar, video, dan esai, serta publikasi aksi-aksi dan tuntutan-tuntutan yang mereka perjuangkan di setiap tahunnya. Selain melalui media sosial, WM Jakarta juga memiliki kegiatan rutin untuk mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi pada kegiatan massa – kampanye dan promosi

untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kegiatan lain yang dilakukan oleh WM yaitu seperti ceramah, debat kelompok, *garage sale*, pemutaran film, dan pertunjukan seni dan musik, serta aksi massa di jalanan ataupun secara virtual. WM Jakarta bertujuan menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk mengekspresikan pengalaman mereka sebagai perempuan tanpa rasa takut akan pembalasan.

Kampanye anti kekerasan seksual masuk dalam gerakan WM Jakarta, salah satunya terlihat dari aksi #WhyIMarch. Berdasarkan permasalahan kekerasan seksual yang menjadi penekanan utama kelompok ini. Para peserta mengatakan bahwa WM mampu menciptakan tempat yang aman bagi para korban untuk mengekspresikan pengalamannya dengan kekerasan seksual. Korban tindak kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan tempat untuk berekspresi, takut untuk melapor dan minimnya partisipasi peraturan dan legalisasi yang menjamin perlindungan atas hak mereka. Sehingga para korban sering didefinisikan sebagai seseorang yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual namun minim memiliki keberanian untuk mengungkapkan cobaan yang dialaminya.⁶⁴

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020.⁶⁵ Data tersebut diambil dari tiga sumber di antaranya, 291.677 kasus dari sumber Pengadilan Agama, 8.234 kasus dari Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, dan 2.389 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan yang dibentuk oleh Komnas Perempuan.⁶⁶ Meskipun demikian, angka kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

62 Elfina Anugrahi Saputri. Loc.cit.

63 Pallavi Guha, Carol Stabile & Radhika Gajjala, "Introduction: Sexual Violence, Social Movements, and Social Media" *A Journal of Gender, New Media, and Technology*, 1 no. 15 (Februari, 2019): 1-7

64 Abdul Muhid, Nailatin Fauziyah, Lia Masfiatul Khariroh, & Funsu Andiarma, "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif", *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1, (April, 2019): 47-55

65 Catatan Tahunan 2020, Loc.cit

66 Tahunan 2020, Loc.cit.

sebesar 31%.⁶⁷ Penurunan kasus bukan berarti menunjukkan penurunan angka kekerasan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Komnas Perempuan bahwa kecenderungan korban yang tidak berani untuk melapor selama masa pandemi yang kemudian menyebabkan penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶⁸ Sebagai salah satu contoh pembatasan layanan dan proses pengadilan di Pengadilan Agama selama pandemi menjadi salah satu penyebab penurunan angka dari kasus tersebut. Artinya, Indonesia masih memiliki PR untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan termasuk menindak lanjuti diskriminasi dan marginalisasi hak-hak perempuan.

Beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di Indonesia di antaranya adalah 79% atau sekitar 6480 kasus merupakan jenis KDRT dan relasi personal.⁶⁹ 3221 kasus atau 49% merupakan kekerasan terhadap istri yang menempati peringkat pertama, kemudian 1039 kasus atau 20% merupakan kasus kekerasan dalam pacaran, lalu disusul 954 kasus (14%) kekerasan terhadap anak perempuan. Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan tersebut sering dilakukan oleh beberapa oknum di antaranya: mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.⁷⁰ Adapun di ranah publik kekerasan terhadap perempuan mencapai 1731 kasus atau sekitar 21% dengan di antaranya 962 (55%) kasus kekerasan seksual yang meliputi 166 kasus pencabulan, 229 kasus pemerkosaan, dan 181 kasus pelecehan seksual, lima kasus persetubuhan serta beberapa percobaan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya.⁷¹

Melihat kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, WM Jakarta konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai perjuangan untuk menegakkan hak-hak perempuan. WM bertujuan untuk menciptakan suara kolektif dari masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran kolektif masyarakat mengenai isu perempuan dan mendesak perubahan kebijakan publik yang pro terhadap nilai dan hak asasi bagi perempuan. Sementara itu, tuntutan utama dalam kampanye ini adalah agar seluruh undang-undang yang dibutuhkan sebagai legalisasi hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk kekerasan seksual, marginalisasi, pekerja migran dan diskriminasi) segera disahkan. Lebih lanjut, kebutuhan akan perlindungan hukum yang tepat bagi korban kekerasan telah menjadi masalah dunia termasuk di Indonesia karena, meskipun korban terlihat paling menderita, mereka belum mendapatkan payung perlindungan hukum yang diperlukan hingga saat ini.⁷² Suatu kebijakan (UU) sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan, pelecehan dan diskriminasi gender sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Salah satu tuntutan WM adalah melindungi pekerja perempuan Indonesia. Hal ini termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri. WM turut mendesak pengesahan UU perlindungan pekerja migran Indonesia. WM juga turut mengadvokasikan Organisasi Pekerja Migran ke DPR. Desakan tersebut akhirnya dikabulkan oleh DPR-RI melalui siding paripurna dengan mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 25 Oktober 2017.⁷³ UU tersebut mencakup jaminan WNI

67 Tahunan 2020, Loc.cit.

68 Tahunan 2020, Loc.cit.

69 Tahunan 2020, Loc.cit.

70 Tahunan 2020, Loc.cit.

71 Tahunan 2020, 2.

72 Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4 no. 1, (April, 2017): 95-120

73 M. Zulfadhilah. Op. Cit, 67.

untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi, jaminan perlindungan bagi WNI dari perdagangan manusia, kekerasan fisik dan seksual, kejahatan atas harkat dan martabat dan pelanggaran HAM lainnya, serta perlindungan pekerja migran Indonesia melalui sistem yang terpadu.⁷⁴

Desakan juga dilakukan WM terhadap tuntutan perlindungan bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Desakan tersebut dilakukan agar perempuan memiliki pedoman mengenai tata cara melakukan acara pidana sehingga persidangan berjalan tanpa menyalahkan atau menyudutkan korban dari kasus kekerasan seksual.⁷⁵ Akhirnya, PERMA no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum disahkan oleh Mahkamah Agung.⁷⁶ PERMA tersebut mengatur konsep kesetaraan gender dalam persidangan termasuk tata perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan oleh Hakim saat sidang yang dapat berpotensi untuk menyudutkan korban.

Meskipun telah berhasil dalam mempengaruhi beberapa kebijakan publik di Indonesia, namun tuntutan pengesahan RUU PKS masih belum terealisasi. Dalam pelaksanaannya, WM mendapatkan banyak tantangan dalam mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia. Beberapa tantangan yang dialami di antaranya pemerintah masih menganggap agenda politik Indonesia mengenai isu yang dibawa oleh WM bukanlah permasalahan utama. Hal ini tentu kontradiktif dengan nilai ke 4 dan 5 Pancasila, UUD 1945 serta RPJMN 2020–2025 dalam memberikan keamanan, perlindungan dan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia termasuk pemenuhan hak-hak terhadap perempuan. Selain itu budaya patriarki di Indonesia masih melekat dengan konstruksi sosial di masyarakat yang menyebabkan posisi perempuan sebagai objek yang lemah. Hingga saat ini, RUU PKS sebagai salah satu tuntutan WM yang diperjuangkan semenjak tahun 2018 belum disahkan. Bagaimanapun, agenda politik yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu misinya adalah melindungi segenap bangsa dengan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia.⁷⁷

Perjuangan kelompok perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak perempuan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan reformasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari aksi dan strategi yang diambil oleh kelompok gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) di berbagai daerah. Fokusnya pun bukan hanya pada persoalan perempuan saja, melainkan dapat meningkatkan hal mengenai kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.⁷⁸ Sehingga, keberadaan WM Indonesia sebagai kelompok promosi dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia khususnya terhadap isu-isu perempuan dan diskriminasi gender yang masih dipandang sebelah mata dalam agenda politik Indonesia.

74 Zulfadhilah, 67.

75 Zulfadhilah, 75.

76 Admin MaPPI, "Cerita Perubahan "Perma No. 3 Tahun 2017 : Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan" *MaPPIFHUI* 24 Juli 2018, diakses pada 20 Maret 2022 <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

77 Laporan Bappenas, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, (Jakarta: Bappenas, 2020), 3-5

78 Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho, Abby Gina, "Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia". *Jurnal Perempuan* 24, no. 1, (Februari, 2019): 13–26.

Perbandingan Pengaruh WM terhadap Kebijakan Publik antara Indonesia dan Amerika

Artikel ini akan membagi pengaruh WM kepada dua hasil yang berbeda antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil tersebut didapatkan melalui metode MSSD. Pertama, penjelasan tentang pengaruh WM terhadap kebijakan publik di Amerika Serikat. Kedua, penjelasan pengaruh WM terhadap kebijakan publik di Indonesia.

Pertama, pengaruh WM di Amerika Serikat. WM di AS menjadi suatu kelompok kepentingan promosi yang mampu menembus pengaruhnya melewati batas-batas negara. WM di Amerika Serikat juga mendapatkan banyak perhatian dari berbagai akademisi, selebriti dan politikus khususnya mereka yang merupakan rival dari Donald Trump. Hillary Clinton mendukung kelompok ini di twitternya yang menyatakan *“Terima kasih kepada kelompok Women’s March karena telah menyuarakan, mempromosikan dan berjuang untuk nilai-nilai kita. Saya percaya kita akan lebih kuat bersama”*⁷⁹ Dukungan pun kemudian ditunjukkan oleh Elizabeth Warren, Senator Demokrat dari Massachusetts. Ia juga mendukung kelompok ini dengan memberikan pidatonya tentang hak-hak perempuan dan LGBT.

Para akademisi di Amerika Serikat memberikan beberapa pandangannya terhadap protes yang dilakukan WM. Tammy Vigil, Asisten Profesor di Boston University berpendapat bahwa WM telah menyadarkan beberapa kalangan mengenai hak perempuan dalam berpolitik dan bersosial. Rekor jumlah perempuan menunjukkan minat yang meningkat untuk mencari jabatan terpilih dengan berpartisipasi dalam program-program seperti sesi pelatihan kampanye nonpartisan *‘Ready to Run Iowa State University’* untuk perempuan.⁸⁰ Pengaruh WM dalam berpolitik

dibuktikan dengan peningkatan representasi perempuan dalam panggung politik AS pada pemilu tahun 2018. Sekitar 116 dari 535 (84%) anggota terpilih sebagai anggota parlemen bukan dari golongan kulit putih dan 102 perempuan terpilih menjadi anggota dewan di DPR.⁸¹ Menjelang akhir tahun 2017, perempuan kulit hitam menunjukkan kekuatan politik khusus mereka dengan membantu kandidat Demokrat Doug Jones mengalahkan Republikan Roy Moore dalam perlombaan senat khusus Alabama.⁸² Lebih dari itu, pada tahun 2020 kemenangan Joe Biden menjadi momentum penting bagi WM sejak perjuangan dari tahun 2017. Proposisi jumlah kedudukan dalam panggung politik tentu akan berdampak pada kebijakan publik yang akan dikeluarkan di AS. Khususnya, Biden dalam kampanyenya menyebutkan bahwa ia akan memperbaiki kebijakan-kebijakan pada masa Trump serta penghapusan diskriminasi gender dan rasisme seperti isu kemanusiaan, pemberantasan rasisme, atensi terhadap hak-hak anak dan kaum kulit hitam.⁸³

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perempuan juga meningkat, ketika New York Times memuat cerita tentang pelecehan seksual yang dihadapi wanita dari seorang eksekutif pria Hollywood yang berpengaruh, ribuan wanita menunjukkan dukungan untuk para korban dan meningkatkan kesadaran mengenai sifat pelecehan di tempat kerja yang meluas dengan menghidupkan kembali gerakan #MeToo dan berbagi pengalaman dan cerita mereka sendiri. WM berhasil mendorong pemerintah dengan mendesak Kantor Hak Sipil AS untuk mengeluarkan penjelasan dan kebijakan pelecehan seksual. Kantor Hak Sipil AS mengeluarkan kebijakan yang menjelaskan definisi pelecehan seksual

79 Anemona Hartocollis & Yamiche Alcindor, Op.Cit

80 “The Women’s March and Its Impact, One Year Later”, *The Brink Boston University*, diakses pada 3 Januari

2022 <https://www.bu.edu/articles/2018/the-womens-march-and-its-impact/>

81 Benya FF, Widnall SE, Johnson PA, editors, Loc.Cit

82 The Brink Boston University, Loc.Cit

83 Samuel Carliston Anggima Silalahi, Loc.Cit

secara komprehensif, tanggung jawab Kantor Hak Sipil apabila terjadi pelecehan seksual di ranah pendidikan dan pekerjaan, serta hak dan tanggung jawab pekerja dan sipil di bawah kebijakan pada 29 Januari 2019.⁸⁴

Melalui WM, perempuan tampaknya menjadi sangat sadar akan agensi mereka sendiri sebagai aktor politik dan sosial; mereka juga tampak kurang terhambat dalam menggunakan pengaruh mereka. Mereka menolak didefinisikan secara relasional.⁸⁵ Melalui WM, perempuan tampaknya mencoba mengklaim martabat kepribadian yang secara historis menyangkal mereka, dan menggunakan akal mereka sendiri untuk mempertahankan perhatian untuk masalah yang sebelumnya diabaikan atau diberhentikan. Meskipun tidak mungkin untuk mengklaim hubungan sebab akibat yang konkret antara March, dan pemberdayaan perempuan yang tampak dalam berbagai peran sosial dan politik, acara itu sendiri tentu saja menarik perhatian pada ketidakpuasan yang dirasakan perempuan dan memberikan nada positif untuk menafsirkan isu-isu dan tindakan perempuan di seluruh dunia.

Ashley Farmer, Sejarawan bidang Sejarah Wanita Afrika-Amerika sekaligus Professor di Boston University juga mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, WM di Washington menawarkan momen untuk merenungkan percakapan populer dan politik tentang hak-hak perempuan dan peran gender dalam budaya Amerika. Kelompok tersebut telah berhasil mengumpulkan perempuan untuk “mengirim pesan ke semua tingkat pemerintahan bahwa perempuan dapat berdiri bersama dalam solidaritas.”⁸⁶ Para pemimpin WM mungkin tidak dapat mencapai partisipasi yang beragam; namun, mereka menginspirasi percakapan penting tentang keragaman dalam aktivisme dan kepemimpinan. Banyak

cendekiawan dan aktivis menerbitkan artikel yang mengkontekstualisasikan kurangnya keterlibatan perempuan khususnya perempuan kulit hitam dalam politik dan sosial di media massa.

Keberhasilan WM dalam mempengaruhi masyarakat dan kebijakan publik di AS tidak berhenti pada awal kemunculan mereka di tahun 2017. Aksi mereka selalu mendapatkan sorotan masyarakat, dan atensi pemangku politik serta kebijakan publik. Sebagai contoh, keberhasilan WM dalam mempengaruhi kebijakan tentang hak-hak reproduksi pada tahun 2020. AS memberlakukan 89 kebijakan yang terdiri dari 21 kebijakan mengenai proteksi dan perluasan terhadap aborsi, 21 kebijakan mengenai pencegahan kematian ibu, 14 kebijakan mengenai perluasan cakupan kontrasepsi dan infertilitas, 13 kebijakan mengenai peningkatan perawatan Kesehatan reproduksi bagi individu yang dipenjara, 12 kebijakan tentang perluasan rencana keluarga dan pelayanan dan perawatan STI (Penyakit sex menular), dan 8 kebijakan tentang peningkatan tentang pendidikan sex.⁸⁷

Kedua, pengaruh WM di Indonesia. Kelompok WM di Indonesia lebih berfokus pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan, marginalisasi dan diskriminasi hak-hak perempuan. Peran kelompok ini yang paling berpengaruh adalah mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS dan penghapusan segala bentuk diskriminasi gender. Mereka juga berkoalisi dengan Komnas Perempuan di Indonesia dalam mengadvokasikan kepentingan serta tujuannya terhadap pemerintah.⁸⁸ Beberapa keberhasilan yang dilakukan WM Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan di Indonesia adalah membantu organisasi kelompok migran dalam pengesahan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas tuntutan dan desakan mereka

84 United State Government, Loc.Cit

85 The Brink Boston University, Loc.Cit

86 Boston University, Loc.Cit

87 Elizabeth Nash, Lizamarie Mohammed, Olivia Cappello, and Sophia Naide, Loc.Cit

88 Elfina Anugrahi Saputri. Loc.Cit.

pada WM 2017.⁸⁹ Selain itu, WM juga berhasil mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual dalam persidangan dan berhasil mencapai pengesahan PERMA no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁹⁰

WM juga memiliki kesempatan emas di Indonesia untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Melalui beberapa unggahan di media sosial, mereka berhasil menyampaikan isu-isu kekerasan seksual, marginalisasi dan diskriminasi gender di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun kepada masyarakat. WM juga terus mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS yang hingga saat ini masih belum disahkan. Pengaruh WM di Indonesia memang tidak sekuat dengan di AS. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki agenda politik yang masih mengedepankan sektor ekonomi, pembangunan SDM dan infrastruktur. Hal tersebut kemudian menghambat pengesahan RUU PKS yang menjadi salah satu tuntutan WM. Kedua, lemahnya badan hukum dan aparat pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan. Pada tahun 2020 misalnya, berdasarkan laman unggahan WM Jakarta di Instagram menyatakan bahwa respons TNI dan polisi sebagai aparat pemerintah tidak memberikan rasa aman kepada peserta WM. Sikap represif polisi dan TNI dengan membarikade jalan membatasi aksi WM dalam menyuarkan tuntutan. Ketiga, WM di Indonesia tidak memiliki partai oposisi kuat yang dapat ditumpangi dalam melawan pemerintahan saat ini. Berbeda dengan WM di AS yang mendapatkan banyak dukungan dari sektor politik dan partai politik (partai Demokrat), WM di Indonesia masih berjuang sendiri memperjuangkan dan mempengaruhi

89 M. Zulfadhilah, Loc. Cit

90 Admin MaPPI, Loc.Cit

kebijakan publik atas dasar dan nilai demokrasi.

Perjuangan mereka adalah agar perempuan di Indonesia mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum atas diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang mereka dapatkan. Ketimpangan dan rendahnya legalisasi hukum yang dapat melindungi korban kekerasan di Indonesia adalah wujud buruk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Contohnya, Baiq Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual namun justru ia terkena pasal pidana dengan menggunakan UU informasi dan Transaksi Elektronik(ITE).⁹¹ Kemudian, Novia Widyasari, korban kekerasan terhadap perempuan oleh oknum polisi yang berakhir bunuh diri karena tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.⁹² Dan beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya yang bernasib sama - tidak mendapatkan perlindungan dan legalisasi hukum dari negara - adalah bentuk kegagalan dan kegagapan pemerintah dalam mengatasi isu dan hak-hak perempuan.

Meskipun belum berhasil dalam mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS, namun WM berhasil mengangkat tema dan isu-isu perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Selain itu, WM juga berhasil menggabungkan berbagai forum dan komunitas melalui kerja sama dengan beberapa organisasi, LBH, LSM dan komunitas-komunitas lain yang bekerja di bidang yang sama untuk membantu individu-individu yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Bagan di bawah ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat perbandingan

91 Elfina Anugrahi Saputri. Loc.Cit.

92 Indira Rezkisari, "Kematian Novia, Wujud Buruk Penanganan Kekerasan Perempuan", *Republika*, 06 Desember 2021, diakses pada 15 Januari 2022 <https://www.republika.co.id/berita/r3p7i2328/kematian-novia-wujud-buruk-penanganan-kekerasan-perempuan>

Table 1. Perbedaan dan Persamaan MSSD Based on J.S. Mill's Method

MSSD Difference		MSSD Agreement	
Indonesia	Amerika Serikat	Indonesia	Amerika Serikat
Diawali kampanye aksi melawan kekerasan terhadap perempuan	Diawali protes Donald Trump dan kampanye hak dan kesetaraan gender dalam berpolitik dan sosial	Mengangkat isu dan hak perempuan	Mengangkat isu dan hak perempuan
Tuntutan-tuntutan: 2017 (8 tuntutan), 2018 (8 tuntutan), 2019 (10 tuntutan), 2020 (6 tuntutan), 2021 (7 tuntutan)	Kebijakan kesetaraan gender dalam politik dan sosial, pelecehan seksual dan hak reproduksi	Diikuti oleh banyak kalangan (terbuka untuk umum), dan menggunakan sosial media (<i>tool of influence</i>)	Diikuti oleh banyak kalangan (terbuka untuk umum), dan menggunakan sosial media (<i>tool of influence</i>)
Berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan seperti UU No. 18 Tahun 2017, dan PERMA no. 3 Tahun 2017 namun masih belum berhasil mendorong pengesahan RUU PKS (minim perhatian dan agenda politik)	Berhasil mempengaruhi kebijakan dan dinamika politik seperti pemilu 2018 dan 2020, kebijakan pelecehan seksual dan kebijakan kesehatan reproduksi (mendapatkan banyak perhatian dan ditompangi partai politik)	Mendapatkan perhatian dari media, akademisi, pemerintah	Mendapatkan perhatian dari media, akademisi, pemerintah

Table 2. Most Similar System Design (MSSD)

Case	Indonesia	Amerika Serikat
Key pleasant groups	<i>Woman's March Jakarta</i>	<i>Woman's March Washington</i>
Outcome to be explained	<i>Governement, Citizen, Politician support and Tools of Influence</i>	<i>Governement, Citizen, Politician support and Tools of Influence</i>
	<i>Public Policy Change</i>	<i>Public Policy Change</i>
	<i>Effectiveness of influence</i>	<i>Effectiveness of influence</i>

pengaruh WM terhadap kebijakan publik di Indonesia dan Amerika Serikat.⁹³

Dua tabel di atas menjelaskan tentang metodologi perbandingan MSSD dalam membandingkan pengaruh WM terhadap kebijakan publik di dua negara (Indonesia

dan Amerika Serikat). Pertama, di tabel 1, dijelaskan tiga perbedaan dan tiga kesamaan antara WM di Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga kesamaan dan perbedaan tersebut akan menghasilkan beberapa hipotesis MSSD pada tabel 2. Pada tabel 1, perbedaan dapat dilihat dari:

a. Awal kemunculan WM di Indonesia dan

⁹³ Tod Londman. *Issues and Methods in Comparative Politics: an Introduction* (London & USA: Routledge Taylor & Francis Group e-Library, 2008) Hal. 71-73

AS yang memiliki faktor berbeda. WM AS diawali oleh ketidakpuasan terhadap kemenangan Trump, sedangkan Indonesia diawali ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam melawan kekerasan terhadap perempuan.

- b. Tujuan kebijakan - Indonesia menekan dengan tuntutan-tuntutan, sedangkan AS menuntut kebijakan kesetaraan gender dalam politik dan sosial pelecehan seksual dan hak reproduksi. WM AS juga memiliki agenda dan tujuan seperti penekanan terhadap diskriminasi perempuan dan gender.
- c. Hasil selama 5 tahun berdiri - WM AS dapat dianggap berhasil mempengaruhi politik dan kebijakan publik AS. 1) Peningkatan proposisi perempuan dalam bangku politik di pemilu 2018, 2) Kemenangan Joe Biden pada pemilu 2020, 3) Pengeluaran penjelasan kebijakan tentang pelecehan seksual oleh Kantor Hak Sipil AS di bawah Judul VII Undang - Undang Hak Sipil 1964 dan Judul IX Amandemen Pendidikan, dan 4) 89 kebijakan dukungan kesehatan reproduksi. WM AS juga berhasil mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dengan memperluas pengaruh ke 30 negara di dunia. Sedangkan WM Indonesia berhasil mempengaruhi kebijakan publik Indonesia melalui tuntutan-tuntutan yang dibawa. 1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2) PERMA no. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. WM Indonesia belum berhasil mencapai tuntutan mengenai pengesahan RUU PKS namun sudah berhasil mempromosikan dan mengangkat tema atau isu-isu perempuan khususnya masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan diskriminasi gender di masyarakat.

Tabel 1 juga menjelaskan beberapa persamaan antara WM AS dan Indonesia. Tiga persamaan (isu, keanggotaan & alat, dukungan) tersebut yang akan menjadi bahan yang dideskripsikan pada tabel 2. Tabel 2 menjelaskan hasil perbandingan MSSD di antaranya: 1) Kelompok Kunci yang akan dibahas yang terdiri dari nama kelompok kepentingan; dan dukungan pemerintah, politikus, masyarakat dan alat pengaruh (media sosial) terhadap kelompok kepentingan (WM); 2) Hasil yang akan dibahas yaitu terdiri dari perubahan kebijakan publik; dan efektivitas pengaruh kelompok. Adapun untuk menjawab hasil sementara MSSD diantaranya: **Pertama**, WM Jakarta (Indonesia) dan Washington DC (Amerika Serikat) sama-sama mendapatkan dukungan dari pemerintah, politikus dan masyarakat. Keduanya juga menggunakan media sosial media sebagai alat dalam memperluas pengaruhnya. **Kedua**, hasil yang akan dijelaskan dalam perbandingan ini adalah keduanya - WM AS dan Indonesia berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan publik. Namun, efektivitas pengaruh keduanya berbeda. WM AS dapat berhasil mendorong isu-isu yang mereka menuntut mulai dari tuntutan awal ketidakpuasan atas terpilihnya Trump (sebagai awal munculnya WM) dengan kemenangan Joe Biden atas pemilu 2020, peningkatan proposisi kedudukan di politik berbasis gender, kebijakan pelecehan seksual yang lebih jelas hingga kebijakan Kesehatan reproduksi atas tuntutan hak-hak reproduksi. Sedangkan efektivitas pengaruh WM di Indonesia terhadap kebijakan publik masih minim karena terdapat salah satu tuntutan yang belum tercapai yaitu pengesahan RUU PKS. Meskipun demikian, WM AS dan Indonesia berhasil secara promotif dalam mengangkat isu tentang perempuan baik di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Kesimpulan

WM dikategorikan sebagai kelompok kepentingan promosi karena memiliki kepentingan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintah khususnya mengenai kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan isu perempuan. WM berawal dari aksi protes atas ketidakpuasan masyarakat AS terhadap kemenangan Trump. Aksi tersebut kemudian meluas menjadi satu kelompok yang berpotensi untuk mempengaruhi setiap kebijakan publik suatu negara termasuk mobilisasi kepentingan tim oposisi dalam suatu politik. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kelompok kepentingan WM memiliki pengaruh yang besar dalam dinamika politik dunia termasuk pada tatanan perubahan kebijakan publik suatu negara.

Pengaruh besar yang dibawa oleh WM berdampak besar pada retorika kehidupan politik dan sosial dunia. Perbandingan peran dan pengaruh dari WM dari dua negara (Indonesia dan AS) dilakukan untuk mendapatkan efektivitas hasil pengaruh WM terhadap kebijakan publik di dua negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu presidensial, menganut konstitusi dan praktik demokrasi serta memiliki sistem multi partai.

Kesamaan sistem pemerintah antara Indonesia dan AS tidak menjadi jaminan bagi WM untuk mendapatkan keberhasilan yang sama. Perbedaan hasil efektivitas pengaruh tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agenda politik masing-masing. Pengaruh WM di AS mendapatkan perhatian lebih dari berbagai kalangan termasuk politisi dan akademisi. WM AS telah berhasil mendorong isu-isu yang mereka tuntut mulai dari tuntutan awal ketidakpuasan atas terpilihnya Trump (sebagai awal munculnya WM) dengan kemenangan Joe Biden atas pemilu 2020, peningkatan proposisi kedudukan di politik berbasis gender yang mencapai 84% pada pemilu 2018, kebijakan pelecehan seksual

yang lebih jelas oleh Kantor Hak Sipil AS di bawah Judul VII Undang - Undang Hak Sipil 1964 dan Judul IX Amandemen Pendidikan pada tahun 2019, hingga pengeluaran 89 kebijakan Kesehatan reproduksi atas tuntutan hak-hak reproduksi pada tahun 2020.

Sedangkan WM di Indonesia telah berhasil mempengaruhi kebijakan publik seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PERMA no. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. WM Indonesia masih belum berhasil mendorong tuntutan pengesahan RUU PKS hingga saat ini (tahun 2022). Hal tersebut dikarenakan prioritas agenda politik Indonesia yang belum menjadi perhatian besar oleh pemerintah. Baik WM AS dan Indonesia, keduanya telah berhasil mempromosikan dan mengangkat kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai, isu-isu dan hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, Rumiri. "Emansipasi Wanita Amerika dari Masa ke Masa." *Lentera Ejournal Unri* 2, no. 4 (2011): 24-36
- Bappenas, Laporan. "Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024", Bappenas, 2020.
- Berry, Merrie and Erica Chenoweth, "Who Made the Women's March?" in *The Resistance: The Dawn of the Anti-Trump Opposition Movement*, ed. David S. Meyer and Sidney Tarrow New York: Oxford University Press, 2018.
- Boston University, The Brink. "The Women's March and Its Impact, One Year Later". Diakses 3 Juli, 2022. <https://www.bu.edu/articles/2018/the-womens-march-and-its-impact/>.

- Else, Øyen. *Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research*, London: Sage, 1990.
- Ennis, Robert H. *Critical Thinking: A Streamlined Conception*. In: Davies M., Barnett R. (eds) *The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education*. New York: Palgrave Macmillan, 2015
- FF, Benya, Widnall SE dan Johnson PA, editors, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. Washington: National Academies Press, 2018, Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment. diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519453/>
- Government, United State “Sexual Harassment Policy, Office of Civil Rights” U.S. Department of State 29 Januari 2019, diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.state.gov/key-topics-office-of-civil-rights/sexual-harassment-policy/>
- Guha, Pallavi, Carol Stabile, dan Radhika Gajjala. “Introduction: Sexual Violence, Social Movements, and Social Media.” *A Journal of Gender, New Media, and Technology* 1 no. 15, (Februari 2019): 1-7
- Hague, Rod, and Martin Harrop. *Comparative Government and Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Harris, Jenée Desmond, “The Women’s March is more than an anti-Trump protest. Here’s what participants want.” *Vox* 21 Januari 2017, diakses pada 19 Maret 2022 <https://www.vox.com/2017/1/21/14342942/womens-march-inauguration-trump-protest-goals-feminism-demands>
- Hartocollis, Anemona, dan Yamiche Alcindor. “Women’s March Highlights as Huge Crowds Protest Trump: ‘We’re Not Going Away’.” *New York Times*, 21 January. <https://www.nytimes.com/2017/01/21/us/womens-march.html?auth=link-dismiss-google1tap>.
- Herman, Kadir “Perbandingan Pemilu Di Indonesia Dengan Di Amerika”, *Bantuan Hukum* 13 Juli 2021, diakses pada 17 Maret 2022 <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-perbandingan-pemilu-di-indonesia-dengan-di-amerika>
- History.com. “Woman’s March”. Diakses 1 Januari 2022. <https://www.history.com/this-day-in-history/womens-march>.
- Juniman, Puput Tripeni. “Woman’s March di Jakarta Suarakan 8 Tuntutan”. *CNN Indonesia*, 03 Mei 2018. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180303100532-277-280137/womens-march-di-jakarta-suarakan-8-tuntutan>.
- Landman, Todd. *Issues and Methods in Comparative Politics: an Introduction*. London & USA: Routledge Taylor & Francis Group e-Library, 2008.
- Larreboure, Magdalena dan Felipe Gonzalez, “The Impact of the Women’s March on the U.S. house Election” *Pontificia Universidad Catolica de Chile*, (Maret 2021): 4-5 diakses pada 19 Maret 2022 <https://economia.uc.cl/wp-content/uploads/2021/03/dt-560.pdf>
- Liputan6. “Perjalanan Woman’s March dari Amerika hingga Indonesia Visual Stories.” Diakses 05 Februari 2022. <https://m.liputan6.com/pages/perjalanan-women-march-dari-amerika-hingga-indonesia>.

- Lockley, Anne, Lies Marcoes, dan Abby Gina Kharisma Nugroho. "Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 24, no. 1 (Februari 2019):13-26.
- MaPPI, Admin "Cerita Perubahan "Perma No. 3 Tahun 2017 : Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan" *MaPPIFHUI* 24 Juli 2018 , diakses pada 20 Maret 2022 <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>
- Martiany, Dina. "International Women's Day Dan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Seksual." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no. 5(Maret 2018): 13-18.
- Mazrieva, Eva. 2018. "Protes 'Women's March' di Washington Guncang Dunia". *VoA Indonesia*, 22 Januari 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/protes-womens-march-washington-guncangdunia/3686721.html>.
- Muhid, Abdul, Nailatin Fauziyah, dan Funsu Andiarma Lia Masfiatul Khariroh. "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif." *Journal of Health Science and Prevention* 3 no. 1 (April 2019): 47-55.
- Nash, Elizabeth, Lizamarie Mohammed, Olivia Cappello, and Sophia Naide, "State Policy Trends 2020: Reproductive Health and Rights in a Year Like No Other" *Guttman Institute* 15 December 2020, diakses pada 20 Maret 2022 <https://www.guttman.org/article/2020/12/state-policy-trends-2020-reproductive-health-and-rights-year-no-other>
- Newton, Kenneth, and Jan W. Van Deth. *Foundation of Comparative Politics* . New York: Cambridge University Press, 2010.
- North, Anna "The Women's Marches are shrinking. Their influence isn't." *Vox* 17 Januari 2020, diakses pada 19 Maret 2022 <https://www.vox.com/2020/1/17/21068870/2020-womens-march-washington-election-women-voting>
- Powell, Tori B. "Thousands gather for the 2021 Women's March to stand up for abortion rights" *CBS News*, 4 October, 2021, <https://www.cbsnews.com/live-updates/womens-march-watch-live-stream-today-2021-10-02/>.
- Rafferty, John P. "Women's March, worldwide protest [2017]" *Britannica* 21 Januari 2017, diakses pada 16 Maret 2022 <https://www.britannica.com/event/Womens-March-2017>
- Ramadhan, Muhammad Syahrul "Women's March 2019 Usung Tema Perempuan dan Politik", *Medcom*, 25 April, 2019, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNg5017k-women-s-march-2019-usung-tema-perempuan-dan-politik>.
- Ramdhani, Iqbal. "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 4, no. 1. (April 2017): 95-120
- Rezkisari, Indira "Kematian Novia, Wujud Buruk Penanganan Kekerasan Perempuan", *Republika*, 06 Desember 2021. <https://www.republika.co.id/berita/r3p7i2328/kematian-novia-wujud-buruk-penanganan-kekerasan-perempuan>
- Santoso, Bangun dan Stephanus Aranditio "6 Tuntutan Kaum Perempuan di Peringatan Women International Day 2020" *Suara. Com* 08 Maret, 2020 <https://www.suara.com/news/2020/03/08/131114/6-tuntutan-kaum-perempuan-di-peringatan-woman-international-day-2020>

- Saputri, Elfina Anugrahi. "Gerakan Sosial Women's March Jakarta Dalam Melakukan Konstruksi Atas Anti Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Indonesia." Skripsi S1 UMS, 2020.
- Setiyono, Budi. *Konsepsi dan Perbandingan Politik*. Semarang: Eprints UNDIP, 2019.
- Silalahi, Samuel Carliston Anggima, "Analisis Strategi Kemenangan Joe Biden Pada Pemilu Di Amerika Serikat Tahun 2020" Skripsi S1 Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Tahunan 2020, *Catatan Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2021).
- Tempo.co, "Women's March Jakarta Mengusung 8 Tuntutan untuk Pemerintah" *Nasional Tempo* 4 Maret 2017, diakses pada 16 Maret 2022 <https://nasional Tempo.co/read/852617/womens-march-jakarta-mengusung-8-tuntutan-untuk-pemerintah/full&view=ok>
- Zulfadhilah, M. "Pengaruh Gerakan Transnasional Women ' S March Terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Pada Tahun 2017-2018." Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.